

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) & NPWP 16 Digit

¹⁾Devy Pusposari*, ²⁾Hendi Subandi, ³⁾Adrian Devano, ⁴⁾Lintang Ayu Dyah Choirunnisa
^{1,2,3,4)}Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia
Email Corresponding: devy.p@ub.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Sosialisasi Reformasi perpajakan PSIAP	Rendahnya tingkat literasi perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pajak negara. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak adalah melakukan berbagai reformasi sistem, salah satunya adalah PSIAP. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai PSIAP, tentu saja akan menghambat pengoptimalan sasaran manfaat dari adanya pembaharuan SIAP, termasuk bagi masyarakat itu sendiri yang sejatinya dapat memperoleh berbagai macam manfaat dari Proyek PSIAP. Sosialisasi Taxation Update Series dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat dan Wajib Pajak terkait berbagai reformasi perpajakan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman literasi perpajakan dan berimplikasi terhadap lebih banyak Wajib Pajak yang sadar dan patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Luaran pengabdian ini adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Keywords: Socialization Tax reform PSIAP	ABSTRACT The low level of tax literacy possessed by the public will certainly have a significant influence on the sustainability of state taxes. One of the efforts that the government has made to continue to increase tax revenues is to carry out various system reforms, one of which is PSIAP. The lack of public understanding regarding PSIAP will of course hinder the optimization of targeted benefits from PSIAP updates, including for the community itself who can actually obtain various benefits from the PSIAP Project. Taxation Update Series socialization aims to provide education and understanding for the public and Taxpayers regarding various tax reform. The expected benefit of this activity is an increase in understanding of tax literacy and this has implications for more taxpayers being aware and obedient in carrying out tax obligations. The output of this service is Intellectual Property Rights (HKI).
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri lagi, permasalahan mengenai isu perpajakan hingga kini nyatanya masih terus menjadi problematika yang belum terselesaikan di Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang kian menjadi titik fokus perhatian pemerintah tidak lain yaitu terkait masih rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia mengenai dunia perpajakan. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022, jumlah masyarakat Indonesia yang telah paham mengenai literasi perpajakan masih berkisar di angka 50 persen saja. Di samping itu, menurut paparan Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, masih terdapat lebih dari 40 persen masyarakat Indonesia yang masih kurang memahami tentang seluk-beluk pajak beserta manfaatnya (Pajak.com, 2022).

Padahal, rendahnya tingkat literasi pajak yang dimiliki oleh masyarakat tentu saja akan berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pajak negara. Pajak bagi negara adalah salah satu faktor yang sangat krusial. Pajak menyediakan sumber pendanaan yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada perwujudan pembangunan nasional seperti yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 (Kementerian Keuangan RI, 2022). Melalui pemahaman yang tinggi mengenai literasi perpajakan, maka kesadaran masyarakat akan pajak pun dapat turut meningkat dan pada akhirnya mampu mengerek pendapatan negara dari sektor pajak

(OJK, 2019). Dengan melihat permasalahan tersebut, salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat akan pajak adalah melalui berbagai macam kampanye dan sosialisasi yang digencarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur), termasuk pada Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kantor Wilayah Jawa Timur III.

Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur) Kanwil Jawa Timur III merupakan bagian unit eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terletak di Malang, Jawa Timur. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jawa Timur III membawahi sebanyak 15 unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa Timur, seperti KPP Madya Malang, KPP Pratama Malang Selatan, KPP Pratama Banyuwangi, KPP Pratama Jember, dan masih banyak lagi. Sebagai bagian unit dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jatim III juga turut serta berkontribusi pada pelaksanaan Reformasi Perpajakan III (2018-2014) yang mengusung lima tema utama, di mana salah satunya tertuang dalam tema Teknologi Informasi dan Basis Data serta tema Proses Bisnis. Kedua tema Reformasi Perpajakan III ini diwujudkan melalui Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP sendiri adalah proyek perancangan ulang terkait proses bisnis administrasi perpajakan dengan menggunakan pembangunan sistem informasi berbasis COTS (*Commercial Off-the-Shelf*) yang disertai dengan pembenahan basis data sehingga sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti (SIAP-MANTAP). Terdapat beberapa perubahan yang dibawa oleh PSIAP, salah satunya adalah proses bisnis *to be* yang menyediakan *multi account billing* sehingga dapat memudahkan perekapan beberapa jenis tagihan pajak ke dalam satu ketetapan. Pembaharuan yang dilakukan diharapkan mampu untuk memperkuat pelayanan dan pengawasan sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi penerimaan negara dari sektor pajak (Pajak.go.id, 2022).

Tidak hanya bagi negara, manfaat dari adanya Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) juga turut ditujukan bagi para wajib pajak, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur, instansi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur, maupun pemangku kepentingan. Bagi wajib pajak, PSIAP membawa manfaat berupa peningkatan layanan yang lebih berkualitas, adanya kepemilikan akun Wajib Pajak pada Portal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur, berkurangnya potensi sengketa, serta biaya kepatuhan yang lebih rendah. Bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur, manfaat yang dapat dirasakan yaitu mulai dari sistem yang lebih terintegrasi, berkurangnya pekerjaan manual, produktivitas meningkat, hingga peningkatan kapabilitas pegawai. Kemudian, bagi instansi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur, PSIAP bermanfaat dalam kekredibelan, peningkatan akuntabilitas, meningkatkan kepatuhan, dan juga meningkatkan aspek kinerja instansi. Sedangkan bagi pemangku kepentingan, dengan adanya pembaharuan SIAP, manfaat yang dapat diperoleh adalah tersedianya data yang valid dan *real time* serta meningkatkan kualitas dalam hal tugas maupun fungsi (Pajak.go.id, 2022).

Namun demikian, upaya Reformasi Perpajakan III melalui Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang turut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jawa Timur III nyatanya belum dapat berjalan secara maksimal akibat masih kurangnya kontribusi dari pihak-pihak sasaran yang dituju, terutama pada masyarakat luas. Berfokus pada sisi masyarakat, tingkat pemahaman literasi yang cenderung rendah terkait pengetahuan maupun perkembangan informasi-informasi terkini mengenai dunia perpajakan masih menjadi salah satu permasalahan dan tantangan utama bagi Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jatim III untuk mengoptimalkan realisasi Proyek PSIAP. Berikut merupakan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jatim III terkait aspek pada sasaran masyarakat umum:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai latar belakang dari diterapkannya PSIAP
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dari diterapkannya PSIAP, serta
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dari diterapkannya PSIAP

Minimnya pemahaman masyarakat mengenai PSIAP, tentu saja akan menghambat pengoptimalan sasaran manfaat dari adanya pembaharuan SIAP, termasuk bagi masyarakat itu sendiri yang sejatinya dapat memperoleh berbagai macam manfaat dari Proyek PSIAP.

Oleh karena itu, berkaca dari beberapa kondisi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III tersebut, tim pengabdian berencana untuk mengusung sebuah program inovatif yang berjudul “**Taxation Update Series**”. Program Taxation Update Series merupakan

sebuah program yang dijalankan dalam bentuk seminar mengenai isu perpajakan terkini yang khususnya ditujukan dengan sasaran masyarakat umum, terutama mengenai isu Reformasi Perpajakan III yang bertemakan tentang Proyek Pembaharuan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Dengan menggandeng Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kantor Wilayah Jawa Timur III sendiri sebagai mitra pelaksanaan program, program Taxation Update Series diharapkan mampu untuk menjadi sarana atau wadah perluasan pengetahuan maupun informasi-informasi terkini mengenai adanya Proyek PSIAP. Melalui program Taxation Update Series yang juga turut melibatkan profesional ahli dalam bidang perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jatim III, diharapkan masyarakat umum mampu untuk meningkatkan literasi perpajakan melalui seminar yang diadakan sehingga pada akhirnya dapat memperoleh informasi penting mengenai latar belakang, tujuan, hingga manfaat dari diterapkannya PSIAP. Dengan demikian, program Taxation Update Series, tidak hanya ditujukan untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur Kanwil Jatim III dalam membenahi permasalahan PSIAP, tetapi juga ditujukan untuk turut memaksimalkan manfaat yang diterima masyarakat dari diterapkannya PSIAP.

II. METODE

Kegiatan sosialisasi mengenai perpajakan diselenggarakan dengan kerjasama antara akademisi bidang perpajakan dan pihak fiskus dari Tim Penyuluh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jatim III. Para peserta diberikan informasi melalui metode pelaksanaan yang terintegrasi, melibatkan presentasi dan diskusi panel. Presentasi ini dihadirkan oleh para ahli perpajakan, yang memberikan pemaparan mendalam mengenai materi terkait.

Adapun tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini dibagi menjadi tiga fase:

1. Pra Acara

Sebelum melakukan pelaksanaan acara, berikut merupakan berbagai tahapan yang dilakukan pada fase Pra Acara:

1. Mempersiapkan kepanitiaan acara Sumber daya manusia untuk kepanitiaan acara diperoleh dari pengurus Tax Center FEB UB dan Relawan Pajak Tax Center FEB UB.
2. Memberikan arahan kerja kepada divisi-divisi yang bersangkutan Dilakukan dengan rapat koordinasi antar koordinator divisi.
3. Tinjauan literasi Mencari informasi terkait materi webinar yang akan disampaikan melalui sumber-sumber terpercaya seperti website Direktorat Jenderal Pajak, google scholar, elsevier, dan lain-lain.
4. Mencari narasumber Narasumber diperoleh dari instansi mitra, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur
5. Mempersiapkan konsep dan mekanisme pelaksanaan acara Dibuat oleh divisi acara yang terdiri dari rundown, juknis, juklak, TOR, MOU, dan lainnya.
6. Mempersiapkan sambutan Sambutan akan disampaikan oleh Dekan FEB UB dan Ketua Tax Center FEB UB.
7. Mempersiapkan zoom webinar Menyewakan zoom webinar sebagai media untuk melaksanakan acara
8. Broadcast acara secara masif agar jangkauan peserta semakin luas Branding acara agar masyarakat semakin *aware* terhadap kegiatan kerja ini

2. Pelaksanaan Acara

Berikut merupakan berbagai tahapan yang dilakukan pada saat fase Pelaksanaan Acara:

1. Acara akan dilaksanakan secara online
2. Semua panitia bersiap untuk masuk terlebih dahulu ke room Zoom agar dapat mempersiapkan acara
3. Mengirim link absensi dan link zoom yang sudah disatukan kepada seluruh civitas akademika Universitas Brawijaya dan masyarakat umum
4. Menjalankan acara sesuai juknis yang sudah dirangkai
5. Mengirim link kuesioner kepuasan acara
6. Dokumentasi
7. Ucapan terima kasih kepada para peserta.

3. Pasca Acara

Berikut merupakan beberapa tahapan yang dilakukan pada saat fase Pasca Acara:

1. Melakukan evaluasi dengan seluruh panitia
2. Membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) acara
3. Melakukan publikasi acara di sosial media Tax Center FEB UB
4. Membuat publikasi artikel ilmiah dan berbagai luaran lainnya.



Gambar 1. Flyer Pelaksanaan Sosialisasi

Setelah tahap presentasi, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Diskusi ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengklarifikasi, dan mendiskusikan aspek-aspek yang masih belum dipahami atau memerlukan pembahasan lebih lanjut. Interaksi antara peserta, akademisi, dan pihak fiskus menciptakan suasana belajar yang dinamis dan partisipatif.

Sebagai langkah penutup, panitia menyelenggarakan evaluasi internal. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program sosialisasi. Evaluasi juga dilakukan secara spesifik terhadap setiap divisi yang terlibat, dengan memeriksa pencapaian jobdesk masing-masing. Feedback dari peserta dihimpun melalui kuesioner, dan data tersebut diharapkan dapat menjadi indikator kuantitatif untuk mengukur keberhasilan dan perbaikan di masa mendatang. Keseluruhan acara sosialisasi ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung pertukaran pengetahuan antara pihak-pihak yang terlibat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Taxation Update Series Vol 1: Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) & NPWP 16 Digit merupakan kegiatan yang diselenggarakan melalui media Zoom pada bulan September 2023. Acara ini dimulai pukul 09.00 WIB dengan pembukaan oleh master of ceremony (MC), dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Tax Center FEB UB. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai Pembaruan Sistem Inti Perpajakan (PSIAP) dan NPWP 16 Digit.

Materi disampaikan oleh pihak akademisi bidang perpajakan dan Tim Penyuluh Kanwil DJP Jatim III. Keduanya memberikan pandangan dari perspektif yang berbeda, memberikan peserta wawasan komprehensif mengenai perubahan-perubahan terkini dalam administrasi perpajakan. Setelah pemaparan materi, agenda berlanjut ke sesi diskusi panel yang melibatkan peserta.

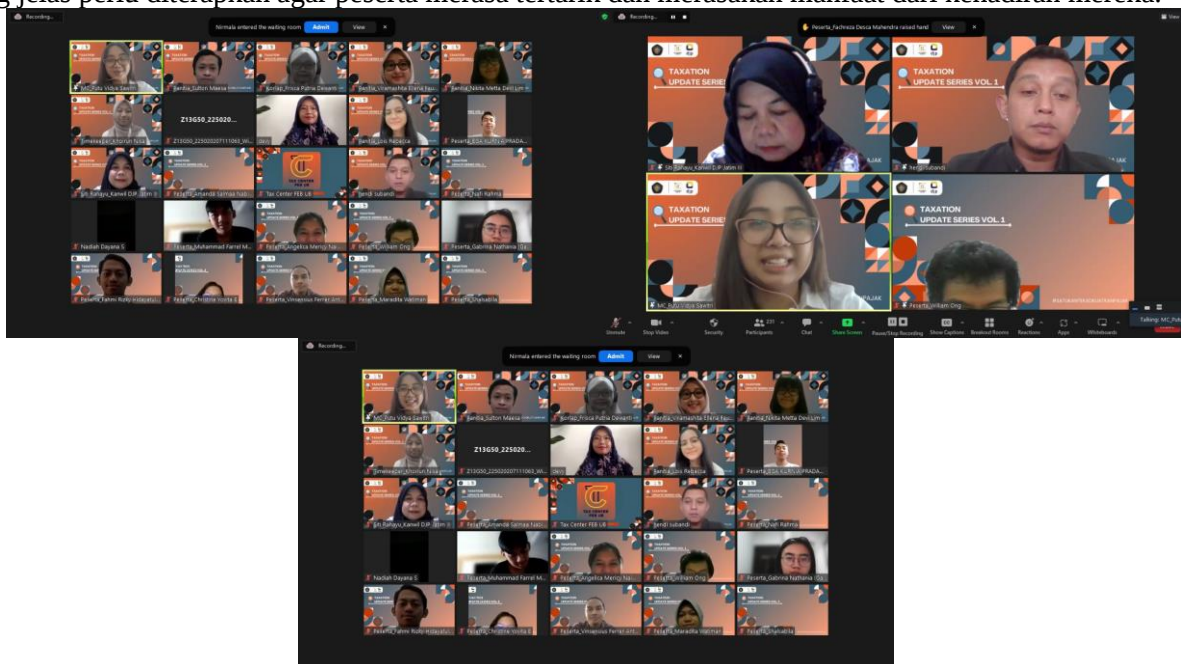
Diskusi panel berlangsung dengan sangat aktif, terutama dari peserta yang berasal dari UMKM. Mereka menyuarakan ketertarikan dan keingintahuan terkait implikasi PSIAP terhadap proses bisnis mereka. Pertanyaan seputar dampak PSIAP terhadap pelaporan pajak penghasilan Badan dan Orang Pribadi menjadi fokus utama, mencerminkan kebutuhan pemahaman lebih dalam dari sektor bisnis.

Peserta dari kalangan mahasiswa juga turut berkontribusi dengan menanyakan seberapa efektifitas PSIAP dibandingkan dengan sistem yang sudah ada. Pertanyaan ini relevan mengingat PSIAP merupakan proyek skala besar, dan jawaban serta tanggapan dari pemateri memberikan wawasan baru yang signifikan. Diskusi tersebut tidak hanya memberikan jawaban terkait pertanyaan peserta, tetapi juga melibatkan pertukaran pandangan dan pemikiran yang memperkaya pemahaman tentang PSIAP.

Sebagai penutup, kegiatan ini memberikan platform yang berharga untuk mendiskusikan perubahan signifikan dalam dunia perpajakan. Interaksi antara peserta, akademisi, dan Tim Penyuluh menciptakan suasana yang dinamis dan kolaboratif. Acara ditutup dengan pemberian apresiasi kepada pemateri, sesi foto bersama, dan pengisian link presensi serta kuesioner evaluasi untuk mengukur kepuasan dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk peningkatan kegiatan serupa di masa depan.

Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan timeline dari rencana awal. Tantangan ini muncul karena pihak mitra, Kanwil DJP Jatim III, perlu memastikan kesiapan mereka untuk menyampaikan sosialisasi terkait PSIAP. Keadaan ini berdampak pada penyesuaian jadwal dan memerlukan koordinasi ekstra untuk memastikan kelancaran acara.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menarik perhatian masyarakat terhadap webinar PSIAP. Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami PSIAP dan urgensi terkait, sehingga perlu upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran mereka. Dalam mengatasi hal ini, strategi promosi yang efektif dan komunikasi yang jelas perlu diterapkan agar peserta merasa tertarik dan merasakan manfaat dari kehadiran mereka.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Melalui Daring

Meskipun demikian, kegiatan ini berhasil mengumpulkan sekitar 350 peserta dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk akademisi, mahasiswa, dan pelaku UMKM. Tingginya partisipasi ini mencerminkan antusiasme yang tinggi terhadap perubahan di bidang perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Departemen Akuntansi yang telah berkontribusi dalam kelancaran penyelenggaraan kegiatan ini.

Sebagai penutup, kegiatan pengabdian masyarakat berupa webinar perpajakan ini diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para pemateri. Sesi foto bersama antara peserta dan pemateri menjadi momen kebersamaan yang berkesan, sementara pengisian link presensi dan kuesioner evaluasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik konstruktif dari peserta guna perbaikan di masa mendatang. Keseluruhan, meskipun

dihadapkan pada beberapa kendala, kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perubahan perpajakan.

IV. KESIMPULAN

Kegiatan ini telah menjadi sarana prasarana masyarakat yang diberikan oleh Tax Center FEB UB dalam memberikan berbagai informasi terbaru mengenai regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari agenda ini adalah untuk memastikan bahwa setiap Wajib Pajak di lingkungan instansi Universitas Brawijaya sudah mengetahui adanya pembaharuan regulasi ataupun sistem administrasi dalam perpajakan. Dalam hal ini Wajib Pajak telah mendapatkan informasi terbaru mengenai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) dan juga ketentuan terbaru NPWP yaitu sebanyak 16 digit.

Saran untuk acara ini adalah memperluas cakupan materi serta memperluas target *audience*. Taxation Update Series harus mampu membahas isu-isu perpajakan dan dinamis dan menarik untuk dibahas. Hal ini juga linear dengan nawacita Tax Center FEB UB sebagai wadah pengetahuan perpajakan bagi masyarakat. Dengan beragamnya isu yang dibahas, harapannya *insight* masyarakat terkait perpajakan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Keuangan RI, 2022. *Pajak untuk Pembangunan Nasional* [online] Tersedia di: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14978/Pajak-untuk-Pembangunan-Nasional.html> (Diakses pada 20 April 2023, pukul 20.01 WIB)
- OJK, 2019. *Ayo Bantu Pemerintah dengan Sadar Pajak* [online] Tersedia di: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10484> (Diakses pada 20 April 2023, pukul 20.03 WIB)
- Pajak.com, 2022. *LSI Sebut 50 Persen Masyarakat Paham Literasi Pajak* [online] Tersedia di: pajak.com/pajak/lsi-sebut-50-persen-masyarakat-paham-literasi-pajak/ (Diakses pada 20 April 2023, pukul 19.57 WIB)
- Pajak.go.id, 2022. *Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan* [online] Tersedia di: <https://pajak.go.id/id/psiap> (Diakses pada 20 April 2023, pukul 20.08 WIB)